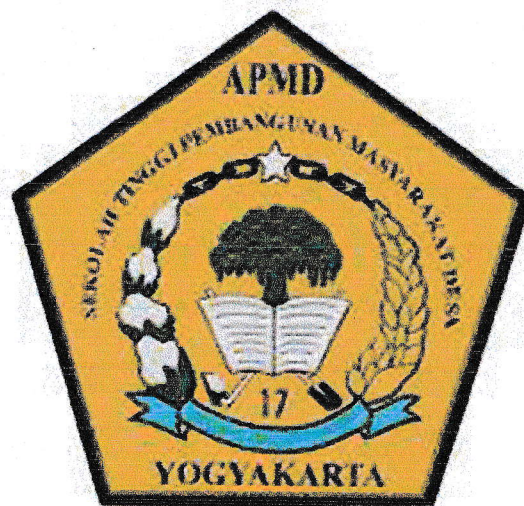


**PROGRAM INOVASI DESA MELALUI DIVERSIFIKASI  
KETERSEDIAAN PANGAN DI DESA PLAWIKAN  
KABUPATEN KLATEN PORVINSI JAWA TENGAH**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister  
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



disusun oleh:  
**MUHAMMAD AFRIZAL BAHTIAR**  
NIM : 22610003

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2024**



**PENGESAHAN**

**TESIS**

**PROGRAM INOVASI DESA MELALUI DIVERSIFIKASI  
KETERSEDIAAN PANGAN DI DESA PLAWIKAN  
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**

**Disusun oleh:**

**MUHAMMAD AFRIZAL BAHTIAR  
NIM: 22610003**

**Disahkan oleh Tim Penguji  
Pada tanggal 07 Februari 2024  
Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing (Ketua Tim Penguji)**

**Dr. R. Widodo Triputro**

**Penguji I**

**Dr. Adji Suradji Muhammad, S. Sos., M. Si**

**Penguji II**

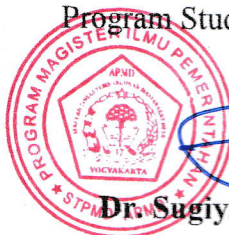
**Dr. Sugiyanto, S. Sos., MM**



Yogyakarta, 07 Februari 2024

Mengetahui,

Direktur Program Magister  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Afrizal Bahtiar  
NIM : 22610003  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul “Program Inovasi Desa Melalui Diversifikasi Ketersediaan Pangan Di Desa Plawikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah” adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Afrizal Bahtiar

## **MOTTO**

*"Mempunyai adab (kebaikan budi pekerti) meskipun sedikit adalah lebih kami butuhkan daripada (memiliki) banyak ilmu pengetahuan"*

(Ibnu al-Mubarak)

**“BUKAN KARENA KAMU YANG HEBAT SAMPAI BERADA DI  
TITIK INI, TETAPI DOA ORANG TUA DAN KELUARGAMULAH  
YANG KUAT YANG MENYERTAI DISETIAP LANGKAHMU”**

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat, rahmat, serta tuntunan-Nya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Peneliti ingin mempersembahkan tesis ini untuk semua orang yang mempunyai peranan penting dalam hidup peneliti:

1. Untuk Ibu Rr. Siti Sofia Ariestiana Hermawati dan Bapak Anda Gunawarman yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan peneliti. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaannya selama ini. Karya ini sebagai bentuk bakti peneliti kepada orang tua. Terima kasih sudah menjadikan peneliti sebagai pribadi yang tangguh, dewasa, dan sabar dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup.
2. Untuk istri tercinta Friska Yuanita Prahardhini, S. Ftr., Ftr, terima kasih karena selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada peneliti. Karya ini sebagai bentuk terima kasih peneliti kepada istri tercinta, yakinlah selalu ada jalan bagi orang yang mau berusaha.
3. Untuk Dosen Pembimbing peneliti Dr. R. Widodo Triputro, terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti haturkan. Atas bimbingan dan kesabaran Bapak selama ini sehingga karya ini dapat selesai dengan baik. Mohon maaf jika ada perkataan atau perilaku peneliti yang kurang berkenan. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak.
4. Untuk seluruh almamater STPMD “APMD” Yogyakarta.

5. Untuk teman-teman Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 29.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tesis dengan judul “PROGRAM INOVASI DESA MELALUI DIVERSIFIKASI KETERSEDIAAN PANGAN DI DESA PLAWIKAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menyadari akan segala kekurangannya. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka dan sangat berterima kasih apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan perbaikan untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Tesis ini dapat terselesaikan tentu saja tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat peneliti mendapatkan ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Sugiyanto, S. Sos, MM., selaku Direktur Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

4. Bapak Dr. R. Widodo Triputro yang telah sabar membimbing peneliti dengan berbagai arahan, sumbangan pikiran, dan gagasannya. Sehingga karya ini dapat peneliti selesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Magister Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, dan memberikan wawasan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar peneliti dalam menyelesaikan tesis.
6. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan tesis. Terima kasih atas dukungan, saran, serta gagasan yang diberikan kepada peneliti untuk proses penyelesaian tesis.

Demikian tesis ini peneliti buat, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Peneliti akan selalu terbuka dan berterima kasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun. Hal ini tentunya akan menjadi pelajaran yang akan selalu dikenang.

Yogyakarta. 22 Januari 2024

Peneliti,

Muhammad Afrizal Bahtiar



## DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN.....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
INTISARI .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Literatur Review .....	10
F. Kerangka Konseptual.....	14
BAB II METODE PENELITIAN .....	32
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Objek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Teknik Penentuan Informan .....	34
F. Teknik Analisis Data .....	35
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....	37
A. Selayang Pandang Desa Plawikan .....	37
B. Pemerintahan Desa .....	40
C. Demografi Desa Plawikan .....	47
D. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Plawikan .....	52

E. Sarana dan Prasarana di Desa Plawikan .....	53
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Program Inovasi Desa Plawikan Melalui Diversifikasi Ketersediaan Pangan Terhadap Ketahanan Pangan.....	55
B. Dampak Dari Program Inovasi Desa Plawikan Melalui Diversifikasi Ketersediaan Pangan Terhadap Ketahanan Pangan di Desa Plawikan.....	88
BAB V PENUTUP .....	113
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	121
LAMPIRAN .....	125
LAMPIRAN A Foto Dokumentasi Penelitian.....	125
LAMPIRAN B Surat Ijin Penelitian .....	132
LAMPIRAN C Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	133
LAMPIRAN D Panduan Wawancara.....	134

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Literatur <i>Review</i> .....	9
Tabel 1.2 Tahapan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan.....	15
Tabel 2.1 Data Informan .....	34
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Tiap RW.....	46
Tabel 3.2 Jumlah Masyarakat Desa Plawikan Menurut Usia .....	47
Tabel 3.3 Data Penduduk Desa Plawikan Berdasarkan Mata Pencaharian .....	49
Tabel 3.4 Data Penduduk di Desa Plawikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 3.5 Data Sarana dan Prasarana di Desa Plawikan.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Komponen Analisis Data Interaktif Menurut Miles dan Huberman ..	36
Gambar 3.1	Peta Wilayah Administratif Desa Plawikan Klaten .....	39
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Plawikan.....	42
Gambar 4.1	Plakat Juara Lomba Ketahanan Pangan di Desa Plawikan .....	60
Gambar 4.2	Lahan Pertanian Desa Plawikan Mayoritas Ditanami Padi.....	65
Gambar 4.3	Warga RT 02 Menyiapkan Lahan Untuk Lomba.....	74
Gambar 4.4	Peresmian KWT Gendhis Manis oleh Ibu Kepala Desa .....	75
Gambar 4.5	Tanaman Cabai Yang Didiversifikasikan Oleh Warga .....	82
Gambar 4.6	Sosialisasi oleh Ketua RT 02 Terkait Diversifikasi Pangan .....	85
Gambar 4.7	Penjurian Lomba Kebun Ketahanan Pangan di RT 02 .....	86
Gambar 4.8	Program Ketahanan Pangan pada RKPDes 2022-2023 .....	89
Gambar 4.9	Lahan Yang Digunakan Untuk Lomba Ketahanan Pangan .....	92
Gambar 4.10	Area Persawahan di Didominasi Tanaman Padi .....	94
Gambar 4.11	Sumber Mata Air Yang Berada di RT 02 Desa Plawikan.....	97
Gambar 4.12	Kelompok Wanita Tani “Gendhis Manis” Dari RT 02 .....	105
Gambar 4.13	Catatan Pembelian Hasil Panen Kebun RT 02.....	110
Gambar 4.14	Komoditi Pangan Hasil Panen Dari Kebun Milik RT 02.....	116

## INTISARI

Salah satu upaya Pemerintah Desa Plawikan dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan program inovasi Desa melalui diversifikasi ketersediaan pangan. Komitmen ini ditunjukkan dengan adanya program ketahanan pangan yang tertera pada RKPDes Desa Plawikan tahun 2022-2023. Selanjutnya program ini diterapkan di Desa Plawikan melalui optimalisasi pekarangan milik warga yang ditanami tanaman pangan sekunder. Dalam pelaksanaannya program ini melibatkan perangkat Desa Plawikan, BPD Desa Plawikan, Petani, dan Masyarakat Desa Plawikan. Anggaran yang digunakan berasal dari 20% alokasi dana desa Plawikan. Program ini didukung dengan sarana irigasi yang baik, serta akses jalan desa yang memadai. Namun program ini dalam implementasinya mengalami penurunan seiring dengan pergantian Kepala Desa yang baru. Mengakibatkan menurunnya animo masyarakat untuk berpartisipasi. Serta adanya dendam politik kepada Kepala Desa yang lama oleh Kepala Desa yang baru. Sehingga dapat menghambat keberlanjutan program tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. Informan berjumlah 13 orang terdiri dari Perangkat Pemerintah Desa Plawikan, Mantan Kepala Desa Plawikan, tokoh masyarakat, Ketua BPD Desa Plawikan, perwakilan Ketua RT, perwakilan petani, pengurus KWT, perwakilan masyarakat di Desa Plawikan. Teknik penentuan informan yang dipakai adalah teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: identifikasi data, reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Program inovasi Desa melalui diversifikasi ketersediaan pangan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Plawikan adalah optimalisasi pekarangan milik warga untuk ditanami tanaman pangan sekunder. Awalnya program ini dapat berjalan dengan baik, hal ini karena antusiasme masyarakat sangat tinggi pada waktu itu. Namun implementasi program ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh bergantinya Kepala Desa, adanya dendam politik antara Kepala Desa yang baru dengan Kepala Desa yang lama, lahan yang diminta kembali oleh pemiliknya, berkurangnya SDM yang berperan aktif, dan perilaku diversifikasi pangan yang belum terbentuk di masyarakat. (2) Dampak dari kebijakan ini belum secara signifikan untuk menurunkan angka warga kurang mampu, angka pengangguran serta angka gizi buruk dan *stunting*. Setidaknya dengan adanya program ini berdampak pada pengurangan anggaran rumah tangga. Dan program ini sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 ayat (16) diversifikasi pangan adalah sebuah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Kata kunci: *Konsumsi Pangan Beragam, Diversifikasi Ketersediaan Pangan, Ketahanan Pangan.*

## ABSTRACT

One of the efforts of the Plawikan Village Government in improving food security is through the Village Innovation program by diversifying food availability. This commitment is demonstrated by the food security program outlined in the Village Mid-Term Development Plan (RKPDes) of Plawikan Village for the years 2022-2023. Subsequently, this program is implemented in Plawikan Village through the optimization of residents' yards planted with secondary food crops. In its implementation, this program involves the Plawikan Village apparatus, the Village Consultative Body (BPD) of Plawikan Village, farmers, and the Plawikan Village community. The budget used comes from a 20% allocation of Plawikan Village's village funds. This program is supported by good irrigation facilities and adequate village road access. However, in its implementation, the program has experienced a decline with the replacement of the new Village Head, resulting in a decrease in community enthusiasm to participate. There is also political grudge against the former Village Head by the new Village Head, which may hinder the sustainability of the program.

This research uses a descriptive-qualitative method. The research location is in Plawikan Village, Jogonalan District, Klaten Regency. There were 13 informants consisting of Plawikan Village Government Officials, Former Plawikan Village Heads, community leaders, Chairman of the BPD of Plawikan Village, representatives of RT Chairpersons, representatives of farmers, KWT management, and community representatives in Plawikan Village. The informant determination technique used was purposive sampling. Data collection techniques used were observation, documentation, and in-depth interviews. Data analysis techniques were conducted in stages: data identification, data reduction, data presentation, data interpretation, and drawing conclusions.

The research results indicate that (1) The Village Innovation program through diversification of food availability implemented by the Plawikan Village Government is the optimization of residents' yards for planting secondary food crops. Initially, this program could run smoothly because of the high enthusiasm of the community at that time. However, the implementation of this program experienced a decline due to the change of Village Head, political grudges between the new and former Village Heads, land being reclaimed by its owners, the decrease in active human resources, and the lack of established food diversification behavior in the community. (2) The impact of this policy has not significantly reduced the number of underprivileged residents, unemployment rates, as well as the rates of malnutrition and stunting. At least, this program has an impact on reducing household budgets. And this program is in accordance with Law No. 18 of 2012 concerning Food Article 1 paragraph (16) which defines food diversification as an effort to increase the availability and consumption of diverse, nutritionally balanced foods based on local resource potentials

Keywords: *Diverse Food Consumption, Food Availability Diversification, Food Security.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Dengan wilayah pertanian yang luas dan menyandang gelar sebagai negara agraris tak serta merta membuat petani di Indonesia hidup berkecukupan. Sebagai negara agraris tropis terbesar di dunia dengan memiliki potensi produksi pangan yang cukup besar dan beragam. Indonesia sebenarnya layak untuk menjadi sebuah bangsa yang maju dan makmur sebagai negara produsen pangan utama dunia yang tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional, namun Indonesia juga dapat memasok bahan pangan ke seluruh dunia. Namun ironisnya saat ini Indonesia masih mengimpor komoditi pertanian dari negara tetangga. Perlu diketahui bersama bahwa pangan merupakan hak mendasar utama bagi setiap manusia dimana pemenuhannya dilakukan setiap saat.

Hak atas pangan merupakan bagian dari hak atas kehidupan yang layak, yang merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Pangan yang cukup dan bergizi adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup dan mempertahankan kesehatan. Tanpa akses yang memadai untuk menuju pangan yang cukup dan bergizi, manusia tidak dapat mencapai potensi penuh mereka dan menderita berbagai dampak kesehatan dan sosial. Bahwa kunci kemajuan

dan kesejahteraan dari sebuah bangsa bukan dilihat dari kekayaan alamnya melainkan dari SDMnya. Seperti dapat kita lihat pada sebuah negara yang menderita gizi buruk dan kelaparan hampir dipastikan akan memiliki kualitas SDM yang rendah. Oleh karena itu, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak atas pangan rakyatnya. Negara harus memastikan bahwa masyarakatnya memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang cukup dan bergizi, terutama pada kelompok yang rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Selain itu negara juga harus memastikan keberlanjutan produksi pangan dan meningkatkan sistem distribusi pangan yang adil dan efektif, sehingga hak atas pangan dapat terpenuhi bagi seluruh rakyatnya.

Sebagai kebutuhan yang paling mendasar dan merupakan salah satu aspek pemenuhan dari hak asasi manusia, dengan begitu pangan memiliki arti dan peranan yang sangat penting dalam struktur tatanan kehidupan di masyarakat. Demi mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia diperlukan implementasi kebijakan yang strategis dan sinergitas antara politik dan ekonomi. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan makanan atau minuman.



Selain itu ketahanan pangan yang cukup dapat membantu masyarakat untuk fokus pada pendidikan dan peningkatan keterampilan, karena mereka tidak lagi terbebani dengan masalah kelaparan dan ketidakpastian pangan. Sebaliknya, jika masyarakat mengalami kekurangan pangan, maka mereka cenderung untuk fokus mencari makanan dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga mereka mulai mengabaikan pendidikan dan peluang pengembangan diri. Oleh karena itu peran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dirasa sangat penting dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan juga memiliki konsekuensi logis terhadap keamanan suatu negara. Ketahanan pangan sangat berkaitan erat dengan kestabilan suatu negara. Negara yang memiliki ketahanan pangan yang kuat cenderung lebih stabil secara sosial dan politik karena masyarakat tidak akan merasa tidak terjamin dalam pemenuhan kebutuhan pangan mereka. Begitu juga sebaliknya kerawanan pangan dapat mengakibatkan konflik ataupun perang.

Untuk menjamin keberlangsungan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan produksi pangan maka lahan-lahan pertanian yang masih produktif untuk dipertahankan dan jangan sampai beralih fungsi menjadi kawasan industri, pemukiman, dan penggunaan lainnya. Selain itu salah satu faktor menurunnya produksi pangan disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak menentu di Indonesia. (<https://setkab.go.id> diakses pada tanggal 06

September 2023 pada pukul 08.04 WIB). Sehingga sangat berpengaruh dan membatasi produksi pangan secara berkelanjutan di Indonesia.

Kemudian yang terjadi apabila ketersediaan pangan yang lebih kecil daripada kebutuhan pangan yang lebih besar, maka dapat berimbas pada ketidakstabilan ekonomi. Begitu pula dengan gejolak sosial dan politik yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan akan pangan, dapat mengganggu aspek ketahanan pangan di masyarakat. Pengertian ketahanan pangan seperti yang tertuang pada PP No. 17 / Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pemenuhan akan pangan sepenuhnya menjadi otoritas masyarakat. Dimana pemenuhan keseharian akan kebutuhan pangan bagi rumah tangga menjadi tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. Selaras dengan peran serta pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan di Indonesia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam rumah tangga. Namun ironisnya ketersediaan pangan di Indonesia masih sangat kurang, sehingga dalam pemenuhan akan kebutuhan pangan masih mengandalkan impor dari luar negeri. Masalah tentang ketahanan pangan seharusnya ditangani oleh pemerintah secara serius. Karena hal ini tentu saja akan berdampak langsung

pada keberlangsungan negara dan generasi mendatang. Dan tentu saja jika krisis pangan benar terjadi maka stabilitas negara akan menjadi terganggu.

Untuk menjamin bahwa ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik maka pemerintah melalui Permentan No. 7 Tahun 2021 yaitu tentang petunjuk teknis penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian. Pengalokasian dana desa secara optimal dapat mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pangan masyarakat desa. Dengan adanya dukungan dana desa maka harapannya dapat meningkatkan pembangunan di bidang ketahanan pangan masyarakat desa. Dengan begitu kemandirian pangan dapat diwujudkan oleh masyarakat desa.

Perlu disadari bahwa untuk mewujudkan Indonesia maju maka pembangunan harus dimulai dari desa. Dan upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan ketahanan pangan pada masyarakat desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang kemudian disebut Permendes PDTT No. 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa dapat digunakan sebagai acuan desa dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program ketahanan pangan di desa. Dengan begitu implementasi program ketahanan pangan yang ada di desa dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Sebagai upaya Pemerintah Desa mengatasi krisis pangan yang dihadapi di Indonesia.

Dengan berjalannya program ketahanan pangan dalam mencapai kestabilan dan ketersediaan pangan maka akan menjamin terpenuhinya

cadangan pangan yang ada di desa khususnya cadangan pangan pada rumah tangga. Sehingga apabila penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat dapat terpenuhi, maka masyarakat dapat terhindar dari kerawanan pangan serta krisis pangan yang akan berdampak pada kestabilan keamanan negara. Pemerintah telah mencanangkan beberapa program yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat desa. Dengan mengacu pada tujuan nomor 2 program SDG's (*Sustainable Development Goals*) Desa yang bertujuan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Dalam hal ini tentunya adalah pembangunan yang berfokus pada ketahanan pangan masyarakat desa.

Pada hakikatnya, masalah ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat di suatu daerah seharusnya menjadi prioritas utama pengambilan kebijakan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan dibidang pangan, perlu memetakan prioritas kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pelimpahan kewenangan sepenuhnya pada Pemerintah Desa dalam urusan dibidang pangan bertujuan untuk memastikan pelayanan dalam bidang pangan mampu menjangkau semua elemen masyarakat yang harus dilayani.

Sebuah desa sebenarnya dikatakan berdaulat pangan apabila desa tersebut dapat memproduksi bahan pangan dengan kualitas yang baik dalam jumlah yang sama, atau bahkan dapat melebihi angka kebutuhan pangan dari desa tersebut. Perlunya Pemerintah Desa dalam mengambil langkah strategis untuk

mengakomodir kebutuhan akan pangan, salah satunya adalah dengan diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Desa Plawikan adalah salah satu desa yang dianggap baik dalam mengelola ketahanan pangan. (<https://rolasan.id> diakses pada Senin, 5 Februari 2024). Desa yang terletak di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah ini memiliki luas wilayah sebesar 126,7096 ha atau sekitar 0,05% luas Kecamatan Jogonalan. (<https://Desaplawikan.com/> diakses pada Jumat, 14 Juli 2023, Pukul 09.24 WIB).

Diversifikasi pangan seperti yang tertuang pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 1 ayat (16) adalah sebuah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Hal tersebut senada dengan (Dewi & Ginting, 2012) bahwa diversifikasi pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan menggunakan prinsip gizi yang seimbang. Tujuan dari diversifikasi pangan untuk mencapai kemandirian pangan dan langkah antisipasi terhadap krisis pangan. Kemandirian pangan menjadi tujuan akhir dari program-program ketahanan pangan yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan harapan kemandirian pangan akan mengurangi indeks kelaparan, gizi buruk, dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Sehingga ke depannya menjadikan Negara Indonesia lebih stabil dalam bidang perekonomian dan keamanan negara.

Selain itu program diversifikasi pangan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pangan impor dengan mengembangkan produk makanan dari pangan lokal. Diversifikasi pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai ketahanan pangan. Menurut (Sumaryanto, 2009), menyatakan bahwa diversifikasi pangan berbasis bahan pangan lokal, kondusif untuk mendukung stabilitas ketahanan pangan dan dapat dijadikan salah satu pilar pemantapan ketahanan pangan nasional. Diversifikasi pangan dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi pangan, peningkatan pendapatan masyarakat desa, serta adaptasi dan mitigasi pada perubahan iklim global.

Ketika berbicara masalah diversifikasi pangan, maka ada 3 pengertian yang saling berkaitan di dalamnya; yaitu Diversifikasi Konsumsi Pangan, Diversifikasi Produksi Pangan, dan Diversifikasi Ketersediaan Pangan (Suhardjo, 1998). Ketiganya dapat digunakan oleh Pemerintah Desa sebagai langkah strategis yang dipilih untuk pengambilan kebijakan terkait ketahanan pangan masyarakat desa. Problematika yang berbeda disetiap desa menjadikan otoritas Pemerintah Desa untuk dapat menganalisa dan memetakan permasalahan pangan yang ada di desanya. Sehingga nantinya kebijakan-kebijakan yang akan diambil menjadi tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang menjadi problematika desa terhadap ketahanan pangan.

Pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam penentuan kebijakan-kebijakan strategis yang diputuskan bersama dalam musyawarah desa demi

mencapai tujuan kemandirian pangan yang memiliki aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pangan dapat terpenuhi. Perihal ketahanan pangan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Desa, namun juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Sehingga ketahanan pangan di Indonesia dijadikan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa *food estate* yang salah satunya berada di Kalimantan Tengah (<https://ekon.go.id/> diakses pada 14 Juli 2023 Pukul 10.03 WIB). Ini menandakan bahwa pentingnya ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia. Sudah banyak artikel maupun jurnal yang meneliti tentang ketahanan pangan, utamanya tentang diversifikasi pangan yang ada di masyarakat desa. Diversifikasi pangan merupakan salah satu strategi Pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan di desa.

## **B. Fokus Penelitian**

Salah satu tujuan untuk mencapai ketahanan pangan adalah dengan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan yang digunakan untuk penelitian di Desa Plawikan adalah diversifikasi ketersediaan pangan. Dengan tujuan dapat mengidentifikasi metode-metode pengambilan kebijakan strategis oleh Pemerintah Desa Plawikan terhadap ketahanan pangan.

1. Program diversifikasi ketersediaan pangan dalam rangka ketahanan pangan.
2. Dampak dari program inovasi desa melalui diversifikasi ketersediaan pangan terhadap ketahanan pangan di Desa Plawikan.

### **C. Rumusan Masalah**

Agar tidak terlalu luas pembahasannya maka penelitian ini berfokus pada bahasan mengenai rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana kebijakan di Desa Plawikan terkait diversifikasi pangan terhadap ketahanan pangan?
2. Apa saja dampak dari program inovasi desa melalui diversifikasi ketersediaan pangan terhadap ketahanan pangan di Desa Plawikan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan umum yaitu untuk meninjau bagaimana program diversifikasi ketersediaan pangan berdampak pada ketahanan pangan di Desa Plawikan. Kemudian dari penelitian ini dapat kita ambil manfaat antara lain adalah:

1. Manfaat Akademis

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dalam dunia akademik, terutama pada ranah ilmu pemerintahan di Indonesia serta menambah referensi sehingga dapat dikembangkan pada penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Harapan peneliti dari penelitian ini adalah setiap tahapan penelitian dan hasil penelitian yang didapatkan menjadi sarana perluasan wawasan serta memperoleh pengetahuan secara empirik. Bagi Pemerintah Desa peneliti berharap dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja aparat



melalui pengambilan kebijakan yang strategis dan efektif. Selanjutnya bagi masyarakat Desa Plawikan, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat lebih menambah wawasan bagi masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan. Kemudian bagi petani yang ada di Desa Plawikan, peneliti berharap dengan hasil dari penelitian ini petani dapat lebih tereduksi kaitannya dengan ketahanan pangan yang ideal.

#### E. Literatur Review

Pada penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian yang telah mengangkat tema ketahanan pangan maupun diversifikasi pangan di Desa:

**Tabel 1.1**

Literatur *Review*

No.	Referensi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sumaryanto (2009) Judul: Diversifikasi Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Pangan Metode: Deskriptif Kualitatif Referensi: <a href="https://epublikasi.go.id/berkala/fae/article/view/1845">https://epublikasi.go.id/berkala/fae/article/view/1845</a>	Dengan diversifikasi pangan, stabilitas sistem ketahanan pangan menjadi lebih baik dan untuk kasus seperti di Indonesia dapat	Penelitian membahas tentang diversifikasi pangan untuk ketahanan pangan.	Penelitian ini menitikberatkan diversifikasi pangan secara umum sebagai pilar ketahanan pangan di Indonesia.

No.	Referensi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dimanfaatkan sebagai salah satu pilar pemantapan ketahanan pangan.		
2.	Galuh Prila Dewi dan Ari Mulianta Ginting (2012) Judul: Antisipasi Krisis Pangan Melalui Program diversifikasi ketersediaan pangan Metode: Kualitatif Fenomenologi Referensi: <a href="https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/%20article/view/172">https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/%20article/view/172</a>	Antisipasi krisis pangan yang disebabkan oleh konversi lahan pertanian, peningkatan jumlah penduduk, dan kenaikan harga pangan adalah dengan pengembangan diversifikasi pangan ke arah bahan lokal.	Penelitian membahas tentang diversifikasi pangan untuk ketahanan pangan.	Penelitian ini berfokus pada diversifikasi pangan terkait ketahanan pangan dengan menggunakan bahan pangan lokal untuk antisipasi krisis pangan.
3.	Sri Pujiati, Amelia Pertiwi, Churun Cholina Silfia,	Bahwa tidak adanya korelasi antara	Penelitian membahas tentang	Penelitian ini fokus pada diversifikasi

No.	Referensi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p>Dewa Maulana Ibrahim, Siti Hadiyati Nur Hafida (2020) Judul: Analisis Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan Dalam Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah Metode: Kualitatif Studi Kasus Referensi: <a href="https://pend-geografi.ums.ac.id/publikasi-mahasiswa/">https://pend-geografi.ums.ac.id/publikasi-mahasiswa/</a></p>	<p>ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan dengan indeks ketahanan pangan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Terdapat aspek lain yaitu luas lahan pertanian dan penduduk miskin.</p>	<p>Diversifikasi pangan untuk ketahanan pangan.</p>	<p>ketersediaan pangan kaitannya dengan indeks ketahanan pangan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.</p>
4.	<p>Nuhfil Hanani, Rosihan Asmara, Yustisianto Nugroho (2008)</p>	<p>Pola konsumsi pangan masyarakat di daerah</p>	<p>Penelitian membahas tentang diversifikasi</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang diversifikasi</p>

No.	Referensi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Judul: Analisis Diversifikasi Konsumsi Pangan Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat Pedesaan Metode: Kualitatif; Pendekatan: Analisis Deskriptif Referensi: <a href="https://agrise.ub.ac.id/index.php/agrise/article/view/4">https://agrise.ub.ac.id/index.php/agrise/article/view/4</a>	penelitian belum menunjukkan kondisi diversifikasi konsumsi pangan yang baik. Faktor yang berpengaruh pada diversifikasi pangan rumah tangga pedesaan adalah pendidikan ibu dan kepala rumah tangga.	pangan untuk ketahanan pangan.	konsumsi pangan masyarakat pedesaan.
5.	M. Chairul Basrun Umanailo (2018) Judul: Ketahanan Pangan Lokal dan Diversifikasi Konsumsi Masyarakat (Studi	Adanya ketergantungan terhadap beras yang masih tinggi pada masyarakat dan	Penelitian membahas tentang diversifikasi pangan untuk ketahanan pangan.	Penelitian ini meneliti tentang rendahnya diversifikasi konsumsi pangan

No.	Referensi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p>pada Masyarakat Desa Waimangit Kabupaten Buru) Metode: Kualitatif; Pendekatan: Analisis Deskriptif Referensi: <a href="https://ejournal.unib.ac.id/index.php/agrisep/article/view/5592">https://ejournal.unib.ac.id/index.php/agrisep/article/view/5592</a></p>	<p>menurunnya tingkat partisipasi konsumsi mengakibatkan upaya diversifikasi konsumsi pangan mengalami stagnasi.</p>		<p>masyarakat Desa Waimangit, Kabupaten Buru</p>
6.	<p>Mewa Ariani (2010) Judul: Analisis Konsumsi Pangan Tingkat Masyarakat Mendukung Pencapaian Diversifikasi Pangan Metode: Deskriptif Kualitatif Referensi: <a href="https://www.persagi.org">https://www.persagi.org</a></p>	<p>Tingkat kesejahteraan masyarakat indonesia semakin membaik yang ditunjukkan dengan pangsa pengeluaran konsumsi yang semakin kecil.</p>	<p>Penelitian membahas tentang diversifikasi pangan untuk ketahanan pangan.</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus pada diversifikasi konsumsi pangan dalam upaya perwujudan diversifikasi pangan.</p>

No.	Referensi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	/ejournal/index.php / Gizi_Indon/article/view/84			
7.	<p>Etty Indrianrini, Ir., MS. (2013)</p> <p>Judul: Analisis Diversifikasi Pangan dan Tingkat Kecukupannya Pada Rumah Tangga Petani (Studi Kasus di Desa Bunikasih Kecamatan Warung Kohdang Kabupaten Cianjur)</p> <p>Metode: Kualitatif Studi Kasus</p> <p>Referensi: <a href="https://journal.unwim.ac.id/index.php/paspalum/article/view/51/0">https://journal.unwim.ac.id/index.php/paspalum/article/view/51/0</a></p>	<p>Tingkat kecukupan pangan sumber karbohidrat dan protein yang dihitung berdasarkan kriteria Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (2004) menunjukkan bahwa konsumsi anjuran untuk energi dan protein termasuk kriteria cukup</p>	<p>Penelitian membahas tentang diversifikasi pangan untuk ketahanan pangan.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang diversifikasi konsumsi pangan pada rumah tangga.</p>

Isu ketahanan pangan yang diangkat kali ini sebelumnya telah banyak diangkat dan diteliti oleh peneliti sebelumnya. Banyak dari penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada ketahanan pangan di tingkat nasional hingga ke tingkat rumah tangga. Kesamaan dari penelitian ini adalah mengangkat isu ketahanan pangan yang sudah menjadi isu nasional dan menjadi perhatian tersendiri oleh Pemerintah Pusat. Ketahanan pangan di Desa Plawikan lebih mengerucut pada diversifikasi ketersediaan pangan untuk memenuhi indeks konsumsi dan ketersediaan pangan dari setiap daerah hingga ke tingkatan rumah tangga. Isu ketahanan pangan yang menjadi sorotan dari penelitian kali ini adalah upaya Pemerintah Desa Plawikan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui kebijakan-kebijakan yang dirumuskan terkait ketahanan pangan dengan metode diversifikasi ketersediaan pangan.

Dengan metode diversifikasi ketersediaan pangan ini harapannya Pemerintah Desa Plawikan dapat mengatasi krisis pangan yang sewaktu-waktu dapat melanda Desa Plawikan bahkan Negara Indonesia. Sehingga ke depannya Desa Plawikan dapat mencukupi indeks ketersediaan pangan bagi masyarakat desa. Selain itu upaya diversifikasi ketersediaan pangan di Desa Plawikan harapannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dengan begitu Desa Plawikan akan dapat memenuhi dan mengelola setiap kebutuhan pangan masyarakat desa dan menjadi Desa Mandiri Pangan.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Kebijakan Publik**

Pangan merupakan hal yang mendasar dalam pemenuhan hak hidup manusia. Sehingga dalam pemenuhannya menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah yang berkuasa. Dalam setiap pemenuhan kebutuhan pangan, pemerintah pusat melimpahkan wewenang pelaksanaan program ketahanan pangan kepada Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa. Untuk menjalankan program ketahanan pangan dari tingkat pusat hingga daerah maka perlu dirumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Pentingnya perumusan kebijakan publik terkait ketahanan pangan guna implementasi program ketahanan pangan dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa dapat berjalan sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari pengambilan kebijakan publik. Definisi Kebijakan Publik adalah serangkaian keputusan kebijakan yang diambil seorang ataupun kelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat (Taufiqurokhman, 2014).

Dalam pengambilan kebijakan publik, pemerintah akan merumuskan masalah terlebih dahulu. Perumusan masalah ini diambil dari permasalahan atau kasus-kasus yang ada di daerahnya. Menurut (Dunn, 2003) analisis kebijakan dapat dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang ada



dalam satu atau lebih tahapan proses pembuatan kebijakan. Berikut adalah tahapan dalam proses pembuatan kebijakan menurut William N. Dunn (2003):

**Table 1.2**

Tahapan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan

<b>Fase</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Ilustrasi</b>
Penyusunan Agenda	Pejabat yang dipilih dan diangkat akan menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara yang lainnya ditunda untuk waktu lama.	Legislator negara dan ko-sponsornya akan menyiapkan rancangan undang-undang dan mengirimkannya ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk nantinya dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak akan terpilih.
Formulasi Kebijakan	Para pejabat akan merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan akan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, serta tindakan legislatif.	Peradilan Negara Bagian mempertimbangkan untuk pe-larangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut akan cenderung bias terhadap perempuan dan kaum minoritas.

<b>Fase</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Ilustrasi</b>
Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.	Dalam keputusan Mahkamah Agung pada kasus Roe. V. Wade telah tercapai keputusan mayoritas bahwa setiap wanita mempunyai hak penuh untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang dapat memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.	Bagian Keuangan Kota akan mengangkat pegawai untuk mendukung implementasi peraturan-peraturan yang baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak.
Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi per-syaratannya undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.	Kantor akuntansi publik memantau program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk menentukan luasnya penyimpangan atau korupsi.

Dengan adanya kebijakan publik ini pemerintah memiliki kewenangan dan kekuatan hukum untuk memaksa dan mengatur segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun terkesan memaksa namun hal ini sah untuk diterapkan dan memiliki dasar regulasi yang jelas. Dengan begitu kebijakan publik akan otomatis berdampak langsung pada kehidupan keseharian masyarakat dalam suatu negara. Kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah tak ayal adalah buah dari kontrak antara pemerintah dengan rakyat, dimana rakyat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih terjamin. Kebijakan publik pada dasarnya dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan harapan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah selanjutnya disebut Permenpan 2007 menjelaskan bahwa Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Dengan begitu kebijakan publik memang dibuat dan dirumuskan untuk menyelesaikan dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Pada waktu implementasi kebijakan publik diperlukan pemahaman terkait dasar dan pemahaman prosesnya. Bagian terpenting pada sistem kebijakan publik yaitu dapat memberikan dampak positif dan mengoptimalkan baik itu dalam proses dan pelaksanaannya. Pada waktu penyusunan kebijakan publik tentu saja harapannya dapat menghasilkan kebijakan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan tentunya efektif dan lebih efisien. Dalam hal ini tujuan dari pemerintah membuat kebijakan publik adalah sebagai upaya dalam mencapai visi dan misi yang dibuat dan disepakati pada saat penetapan melalui musyawarah. Sehingga kebijakan publik dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa dalam menjalankan setiap kegiatan maupun pengambilan keputusan yang bersinggungan dengan masyarakat.

Identifikasi atau analisis masalah perlu dilakukan untuk membagi masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Dengan harapan dapat menciptakan kebijakan publik yang strategis, efektif, dan efisien. Untuk kebijakan publik yang dibuat tidak akan serta merta langsung disetujui, namun perlu dilakukan pengujian, penelitian, serta evaluasi sehingga setiap kekurangan-kekurangan dari kebijakan tersebut dapat diminimalisir. Melakukan reformasi kebijakan harapannya dapat menciptakan menjadi jembatan perantara antara evaluasi dan formulasi kebijakan. Dengan artian bahwa setiap masukan yang ada pada evaluasi akan menjadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan yang baru.

Reformasi kebijakan yang telah dibuat akan membentuk konsepsi dasar menjadi sebuah tuntutan, aspirasi, bahkan temuan yang secara ilmiah membentuk kerangka formulasi. Serta dapat dijadikan pilihan untuk melanjutkan kebijakan yang sudah ada namun dengan metode yang lebih baik lagi. Dikarenakan kebijakan publik merupakan tonggak dalam penyelenggaraan suatu negara, yaitu tonggak keberhasilan dalam program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk pembangunan serta pengembangan suatu negara. Sehingga dalam pengimplementasiannya perlu dilakukan dengan seksama dan kontrol yang baik. Dengan begitu akan mempermudah dan mempercepat suatu negara maupun daerah dalam mewujudkan visi dan misinya.

## **2. Ketahanan Pangan**

Indonesia bahkan dunia saat ini sedang menghadapi isu bersama yang sewaktu-waktu dapat mengganggu kestabilan negaranya. Isu krisis pangan atau kerawanan pangan dapat sewaktu-waktu mengintai suatu negara yang mana negara tersebut tidak memiliki ketahanan pangan yang baik dan memadai. Ketahanan pangan di Indonesia sudah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) (<https://setkab.go.id/> diakses pada tanggal 06 September 2023 pukul 08.13 WIB). Dikarenakan oleh Pemerintah Pusat isu ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang cukup penting untuk diperhatikan dan segera untuk ditindaklanjuti ke depannya. Banyak dari daerah yang ada di Indonesia yang masih mengalami kelaparan yang disebabkan oleh krisis pangan di daerah

tersebut. Kasus krisis pangan yang dialami oleh masyarakat di Indonesia perlu segera adanya perhatian khusus dan tindakan nyata dari Pemerintah Pusat.

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan krisis pangan di Indonesia. Salah satunya adalah faktor penyusutan lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan permukiman. Banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan permukiman tak lepas dari semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia namun ironisnya berbanding terbalik dengan ketersediaan pangan di Indonesia. Dengan semakin berkurangnya ketersediaan pangan di Indonesia maka akan berdampak ketahanan pangan di Indonesia.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia saat ini adalah ketahanan pangan. Isu terkait ketahanan pangan menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah dewasa ini. Ironisnya ketahanan pangan di Indonesia harus bergulat dengan pemanfaatan lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi area permukiman. Selain semakin berkurangnya lahan untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan, banyak petani yang kehidupannya tidak sejahtera karena harga beli dari petani oleh tengkulak yang begitu rendah. Sehingga perkembangan di bidang pertanian dirasa lesu karena banyak faktor yang menghambat perkembangan pertanian di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan publik yang terkait dengan ketahanan pangan, harapannya dapat memberikan kewenangan dan kekuatan secara hukum kepada pemerintah dalam mewujudkan kestabilan dan ketersediaan pangan di setiap

daerah. Pemerintah melalui UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah menjelaskan bahwa ketahanan pangan menjadi kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya. Dengan begitu negara telah menjamin kecukupan pangan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga sudah semestinya Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa memasukkan program strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Setiap desa yang memiliki ketahanan pangan yang baik dan memadai akan serta merta menjamin kehidupan serta kesehatan masyarakatnya. Serta akan berdampak pada kehidupan perekonomian masyarakat desa yang akan semakin meningkat.

Namun tidak serta merta dalam mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah tidak menemui kendala di lapangan. Banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi terwujudnya ketahanan pangan pada masyarakat desa. Salah satunya adalah faktor perekonomian masyarakat desa yang lemah, sehingga akan sangat berpengaruh pada indeks konsumsi pangan masyarakat desa. Konsumsi pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat desa akan menjadi tidak bervariasi serta kurang bergizi. Selain itu juga faktor perekonomian yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu harga bahan-bahan pertanian yang terkadang merugikan bagi banyak petani. Selain itu faktor inflasi pangan yang berpengaruh secara signifikan pada pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga (Eriawati et al., 2019).

Faktor lesunya perekonomian yang berdampak pada harga jual bahan-bahan pertanian. Faktor sosial dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi indeks konsumsi pangan pada rumah tangga pedesaan. Faktor sosial dan budaya berperan penting dalam membentuk pola konsumsi pada rumah tangga pedesaan. Sehingga dengan semakin rendahnya diversifikasi konsumsi pangan pada rumah tangga pedesaan akan menghambat terwujudnya kemandirian pangan. Terlebih lagi kurang maksimalnya pengelolaan komoditi pangan di Indonesia menjadi salah satu penyebab kondisi ketahanan pangan di Indonesia masih jauh dari kata memadai. Keragaman sumber daya alam serta keragaman hayati yang ada di Indonesia menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Namun semua itu menjadi tidak berarti ketika pemerintah kurang serius dalam menanggapi dan menghadapi permasalahan yang menghambat meningkatnya ketahanan pangan di Indonesia. (<https://setkab.go.id/> diakses pada tanggal 10 September 2023 pukul 10.12 WIB).

**a. Kebijakan Ketahanan Pangan**

Dengan adanya campur tangan dari pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan di masyarakat. Maka pemerintah perlu merumuskan kebijakan salah satunya adalah kebijakan ketahanan pangan nasional. Kebijakan ketahanan pangan nasional merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian pangan masyarakat di Indonesia. Sehingga kebijakan ini nantinya dapat dijadikan pijakan Pemerintah



Daerah maupun Pemerintah Desa dalam merumuskan dan menjalankan berbagai program strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Sehingga upaya percepatan kemandirian pangan dapat segera terwujud di setiap daerah di Indonesia.

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian pangan adalah dengan mengalokasikan dana anggaran ketahanan pangan pada tahun 2022 yang mencapai Rp. 76,9 triliun, yang dialokasikan untuk:

1. Peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman;
2. Peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan nelayan melalui penguatan kapasitas petani dan nelayan, penguatan akses terhadap input produksi, penyediaan, sarana prasarana pertanian dan perikanan, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi;
3. Diversifikasi pangan dan kualitas gizi;
4. Perbaikan iklim usaha dan daya saing; serta
5. Penguatan sistem pangan berkelanjutan (pengembangan *food estate*) (<https://www.ekon.go.id/> diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 09.17 WIB).

Dalam hal ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam percepatan program ketahanan pangan di setiap daerah. Selain itu perlu adanya

peran aktif dari lembaga terkait khususnya Pemerintah Desa, serta partisipatif dari masyarakat desa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 menetapkan *Food Estate* sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu proyek *Food Estate* yang kini tengah digarap oleh Pemerintah Indonesia adalah *Food Estate* di Kalimantan Tengah. (<https://ekon.go.id/> diakses pada 05 Agustus 2023 pukul 09.38 WIB). PSN *Food Estate* di Kalimantan Tengah merupakan bentuk implementasi dari Perpres No. 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dengan harapan ke depannya Pemerintah Indonesia dapat mengatasi permasalahan yang terkait dengan krisis pangan maupun kerawanan pangan yang akan menimpa Indonesia sewaktu-waktu. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan adalah dengan lumbung pangan (*food estate*) yang akan dibangun diberbagai daerah di Indonesia.

UU No. 18 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (8) tentang Pangan bahwa cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Pemerintah Indonesia telah mengatur dan menetapkan bahwa setiap daerah sebaiknya memiliki lumbung pangan untuk menampung cadangan pangan masyarakat. Selain sebagai cadangan pangan masyarakat, lumbung pangan juga

dapat sebagai penyelamat ketersediaan pangan sewaktu terjadi bencana alam, gagal panen, maupun paceklik yang menyebabkan pasokan pangan menjadi terganggu. Selain itu juga sebagai bentuk antisipatif pemerintah setempat dalam menghadapi harga bahan baku pertanian yang melambung tinggi namun daya beli masyarakat yang masih rendah. Sehingga akan berpengaruh pada kestabilan dari ketahanan pangan masyarakat.

**b. Kebijakan Ketahanan Pangan Desa Plawikan**

Provinsi Jawa Tengah mempunyai lahan pertanian yang cukup luas namun itu saja tidak menjamin ketahanan pangan yang baik di Provinsi Jawa Tengah. Karena saat ini banyak pergeseran fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman masyarakat. Tentu saja akan sangat berpengaruh pada indeks produksi bahan pangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ketahanan pangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada kenyataannya dipengaruhi oleh produktivitas lahan pertanian yang ada. Makin tinggi produktivitas lahan tersebut, maka ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah akan semakin meningkat pula (Prabayanti, 2022).

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan sudah banyak dirumuskan dan diimplementasikan baik itu ditingkat nasional hingga ke tingkat desa. Ketahanan pangan untuk ditingkat daerah akan dijalankan dan dikawal oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di masing-masing daerah. Indeks ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah tidak ada kaitannya

dengan faktor ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Tertera dalam data BPS (Badan Pusat Statistik) *update* terbaru tanggal 27 November 2019 bahwa Kabupaten Klaten memiliki luas panen sebesar 68.596 Ha, dan menghasilkan 58.860 ton gabah kering sehingga produktivitasnya (ton/Ha) dapat mencapai hingga 390.038 ton/Ha. (<https://klatenkab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 06 September 08.20 WIB).

Namun ternyata ada aspek lain yang berpengaruh pada indeks ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu yang mempengaruhi ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah adalah pergeseran fungsi lahan menjadi lahan non pertanian. Banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Semakin berkurangnya lahan pertanian menjadi lahan non pertanian akan menimbulkan ancaman yang cukup serius untuk ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. (Pujiati et al., 2020)

Kemudian untuk di tingkat desa, Pemerintah Desa perlu melakukan identifikasi permasalahan yang terkait dengan ketahanan pangan. Pemerintah Desa melalui RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) akan membuat program strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan untuk 1 (satu) ke depan. Sehingga perlu adanya prioritas masalah dalam merumuskan RPJMDes. Dengan harapan setiap permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan pangan desa dapat segera diatasi. Kemudian untuk perencanaan jangka panjang, Pemerintah Desa akan melakukan pembangunan dan inovasi

dalam upaya menjaga ketersediaan pangan yang ada di Desa. Semua perencanaan jangka panjang tersebut akan tertuang pada RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa) yang berdurasi untuk 6 (enam) tahun ke depan.

Desa Plawikan yang berada di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu desa dengan pengelolaan ketahanan pangan yang baik. Penguatan untuk program ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas oleh Pemerintah Desa Plawikan. Salah satu program untuk ketahanan pangan yakni melalui pemberdayaan masyarakat yang diberikan berupa bantuan berbagai macam sayuran dan berbagai macam hewan ternak. (<https://sieradmu.com/> diakses pada tanggal 06 September 2023 pukul 11.12 WIB).

Untuk ke depannya Pemerintah Desa Plawikan berupaya agar seluruh masyarakat dapat mengimplementasikan kebijakan tentang ketahanan pangan serta mewujudkan kemandirian pangan. Dengan begitu kebijakan ketahanan pangan dapat diterapkan oleh Pemerintah Desa yang berperan sebagai ujung tombak dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan nasional. Dalam merumuskan kebijakan yang strategis, Pemerintah Desa membutuhkan partisipasi dari masyarakat desa sehingga tercipta sinergitas yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa.

Program-program strategis tentang ketahanan pangan yang dibuat dan diimplementasikan oleh Pemerintah Desa tidak lepas dari penggunaan dana

desa. Penggunaan dana desa sebagai upaya mempercepat terwujudnya ketahanan pangan di desa perlu dilakukan dengan menggandeng masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga masyarakat mampu memahami program ketahanan pangan yang ada serta dapat memenuhi kebutuhan pangan masing-masing nantinya. Merespon hal tersebut Pemerintah Desa Plawikan pada awal tahun 2022 langsung mengalokasikan pembangunan ketahanan pangan diambil dari alokasi 20% dana desa untuk ketahanan pangan dan peternakan. (<https://www.wartakita.org/> diakses pada tanggal 06 September 2023 pukul 11.19 WIB).

Diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 pada Pasal 6 ayat (2) bahwa penggunaan dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, poin (b) ketahanan pangan nabati dan hewani. Ketahanan pangan nabati dan hewani tersebut meliputi pengembangan usaha pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan; pengadaan serta pengelolaan lumbung Desa; dan yang terakhir adalah pengolahan serta pengelolaan pasca panen. Dan menjadi hak penuh Pemerintah Desa dalam mengatur dan melaksanakan semua program ketahanan pangan masyarakat yang ada di desa.

Dengan memegang hak penuh atas pengimplementasian program ketahanan pangan di desa. Maka dirasa perlu adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan

ketahanan pangan di desa. Dikarenakan permasalahan yang dihadapi masing-masing desa cukup beragam, sehingga pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Desa adalah keputusan yang cukup bijaksana dan efektif. Permasalahan ketahanan pangan di setiap desa berbeda-beda, sehingga perlu adanya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Ketahanan pangan menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa ketahanan pangan adalah ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi ke sumber daya yang memadai, makanan yang aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

### **3. Diversifikasi Pangan**

Salah satu upaya dalam percepatan perwujudan ketahanan pangan adalah dengan menggunakan metode diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan menggunakan prinsip gizi yang seimbang (Dewi & Ginting, 2012). Sedangkan diversifikasi pangan juga dijelaskan pada UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Diversifikasi pangan harapannya dapat mewujudkan kemandirian pangan pada masyarakat desa dengan berbasis pada produk pangan lokal.

Namun seiring berjalannya waktu, banyak hambatan yang ditemui dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan pada masyarakat desa. Diantaranya

adalah pola hidup masyarakat desa yang menjadi ketergantungan akan produk impor dan cepat saji. Sehingga menjadikan pola pikir masyarakat desa untuk mencukupi kebutuhan pangan secara instan. Hal ini dapat menurunkan indeks diversifikasi konsumsi pangan pada rumah tangga di pedesaan. Peran penting seorang ibu dan kepala rumah tangga dalam menentukan menu makanan yang ada di rumah menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan diversifikasi pangan.

Melalui Peraturan Menteri Pertanian yang selanjutnya disebut Permentan No. 15 Tahun 2013 tentang Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2013. Menjelaskan bahwa pemerintah telah mencanangkan program diversifikasi pangan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan pada masyarakat desa. Dijelaskan pula pada bab 1 pasal 1 bahwa program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat badan ketahanan pangan terdiri dari pedoman gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, pedoman desa mandiri pangan, pedoman penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat, dan pedoman pengembangan lumbung pangan masyarakat.

Oleh sebab itu pemerintah telah melakukan sebuah upaya dalam percepatan ketahanan pangan di Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Dalam hal ini sebenarnya tujuan dari pemerintah sendiri adalah untuk mengurangi ketergantungan



masyarakat akan produk impor. Karena produk impor dirasa akan menumpulkan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Selain itu produk impor cukup mengganggu eksistensi dari produk pangan lokal yang ada. Tidak dipungkiri bahwa banyak di luar sana produk-produk impor yang lebih menarik dan lebih mudah untuk didapatkan. Selain itu kebanyakan produk impor adalah produk-produk instan atau produk cepat saji.

Sehingga dapat dikatakan bahwa terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji dapat berpengaruh buruk pada kesehatan diri. Apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak setiap harinya, maka akan menyebabkan masalah obesitas atau bahkan timbulnya masalah gizi lainnya (<https://yanke.kemkes.go.id/> diakses pada tanggal 06 September 2023 pukul 10.16 WIB). Diperlukan langkah kongkrit dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam menekan kebiasaan buruk dari masyarakat dalam mengkonsumsi produk impor daripada memilih untuk mengkonsumsi produk pangan lokal.

Setiap daerah di Indonesia memiliki bermacam-macam produk pangan lokal yang diunggulkan. Dengan begitu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dapat menekan masyarakat untuk lebih mengkonsumsi produk pangan lokal daripada produk pangan impor ataupun produk cepat saji. Selain itu langkah lain yang harus diambil pemerintah adalah dengan menggiatkan UMKM lokal yang ada agar lebih mempunyai daya saing dengan produk impor yang masuk di Indonesia. Dengan begitu UMKM lokal yang menjual berbagai

pangan lokal akan lebih terbantu apabila semua elemen dapat berpartisipasi dalam menggiatkan UMKM lokal. Selain itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dapat memberikan ruang untuk promosi berupa *event* atau acara yang digelar untuk mengenalkan dan menarik masyarakat untuk lebih mencintai produk pangan lokal.

Perpres No. 22 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dapat menjadi acuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Pengembangan produk pangan lokal tidak hanya sebatas pada pemberdayaan masyarakat melalui UMKM lokal tetapi juga bisa dilakukan melalui KWT (Kelompok Wanita Tani). Metode diversifikasi pangan dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang baik bagi masyarakat desa. Namun diversifikasi pangan tidak hanya terbatas pada diversifikasi konsumsi pangan saja dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun juga dapat dilakukan metode diversifikasi ketersediaan pangan.

Metode diversifikasi ketersediaan pangan merupakan metode untuk penganekaragaman dalam memenuhi indeks ketersediaan pangan pada masyarakat. Ketersediaan pangan di Indonesia sering kali hanya dipenuhi dari sektor pertanian yang mengandalkan lahan pertanian sebagai lahan penyedia

utama. Namun saat ini banyak petani yang mulai kehilangan lahannya dikarenakan ekspansi dari lahan permukiman warga yang menjadikan lahan pertanian sebagai lahan permukiman.

Di sini pentingnya peran Pemerintah Desa dalam mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan diversifikasi ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan lahan-lahan warga maupun tanah kas desa yang tidak digunakan sebagai lahan pertanian yang produktif. Diversifikasi pangan untuk menciptakan ketahanan pangan seharusnya menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan program diversifikasi ketersediaan pangan. Selain itu diversifikasi ketersediaan pangan juga bertujuan agar masyarakat desa tidak bergantung pada pangan impor dan dapat lebih adaptif terhadap mitigasi iklim global. Intervensi Pemerintah Daerah dalam hal ini hanya sebatas pengalokasian dana desa yang kemudian kewenangan pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa secara transparansi dengan partisipasi seluruh aspek masyarakat desa.

Masyarakat desa saat ini harus dihadapkan dengan krisis pangan global serta krisis lahan permukiman penduduk. Sehingga banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan permukiman. Problematika tersebut jelas akan mengganggu upaya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Oleh sebab itu peran aktif Pemerintah Desa disertai partisipasi dari berbagai elemen masyarakat desa dapat mempercepat perwujudan ketahanan pangan dengan cara diversifikasi pangan. Desa dengan lahan yang terbatas dapat menggunakan

metode diversifikasi ketersediaan pangan. Sehingga ketersediaan pangan yang ada di desa dapat dihasilkan dengan aneka ragam metode yang digunakan, antara lain dengan mengoptimalkan lahan pribadi menjadi lahan pertanian produktif.

Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Plawikan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Desa Plawikan, yaitu dengan mengolah lahan yang tidak terpakai menjadi lahan produktif dengan menanaminya dengan berbagai macam tanaman produktif. (<https://soloraya.solopos.com/> diakses pada tanggal 06 September 2023 pukul 11.34 WIB). Selain itu langkah Pemerintah Desa Plawikan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat dengan cara menggiatkan KWT (Kelompok Wanita Tani) yang ada di masing-masing RT. Sehingga ketersediaan pangan pada masyarakat desa tidak tergantung pada satu jenis penyedia bahan pangan. Tetapi dapat ketersediaan pangan dapat dipenuhi dengan berbagai macam cara.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Creswell (2009) penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Lebih lanjut menurut Creswell (2009) bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian. Menurut Hamid Darmadi (2001:52) bahwa lokasi penelitian merupakan tempat proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah pada saat penelitian berlangsung. Penetapan lokasi penelitian akan mempermudah untuk mengetahui lebih lanjut dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Plawikan, karena sesuai dengan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan karena ada beberapa pertimbangan dari peneliti, yaitu

kebijakan dari Pemerintah Desa Plawikan dalam mewujudkan ketahanan pangan serta dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Plawikan.

### **C. Objek Penelitian**

Objek penelitian memang menjadi salah satu hal yang penting di dalam sebuah penelitian. Dijelaskan oleh Sugiyono (2013) bahwa objek penelitian adalah suatu nilai atau atribut atau sifat dari seseorang, objek ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Adapun objek pada penelitian kali ini lebih menitikberatkan pada Kebijakan Pemerintah Desa Plawikan kaitannya dengan program inovasi melalui diversifikasi ketersediaan pangan terhadap ketahanan pangan di Desa Plawikan. Serta dampak yang dirasakan dari program diversifikasi ketersediaan pangan terhadap ketahanan pangan di Desa Plawikan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan beberapa Teknik dalam pengumpulan data, antara lain:

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik jika dibandingkan dengan teknik lainnya seperti wawancara dan kuesioner. Apabila wawancara dan kuesioner hanya

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang saja tetapi juga pada obyek yang lainnya (Sugiyono, 2013).

## 2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalan data yang utama yang sangat besar kemungkinannya peneliti mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya serta lebih mendalam. Menurut (Sugiyono, 2013) bahwa teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data apabila peneliti berkeinginan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan kasus yang harus diteliti. Dan juga jika peneliti hendak mengetahui hal-hal lain dari responden yang lebih mendalam dan dengan jumlah respondennya tidak terlalu banyak. Selain itu teknik pengamatan juga penting untuk dilakukan terkait keperluan proses mencari data serta proses mencari sumber data. Kemudian teknik dokumentasi juga dapat memperkuat perolehan data dari sumber data primer.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada. Dokumentasi dapat berupa catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Bentuk dari dokumentasi dapat berupa catatan, foto, maupun karya dari seseorang. Sedangkan menurut Amirin (2000) teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun serta menganalisis

dokumen, baik itu dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Kemudian dokumen yang telah diperoleh akan diuraikan (analisis), dibandingkan, dan dipadukan sehingga membentuk satu hasil kajian yang sistematis, utuh, dan padu. Dalam hal ini teknik dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan menulis serta melaporkannya dalam bentuk kutipan saja, namun yang disajikan adalah hasil analisis tentang dokumen-dokumen tersebut.

#### E. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian kali ini teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Menurut (Sugiyono, 2013), *Purposive* merupakan teknik pengambilan data dengan menentukan sampel yang sudah dipertimbangkan. Dalam penelitian kali ini maka informan akan diambil berdasarkan keterkaitan informan dengan fokus penelitian yang diambil di Desa Plawikan. Informan yang terkait dengan fokus penelitian ini antara lain:

Tabel 2.1 Data Informan

No.	Nama	Umur	Jabatan
1.	Sutiman	71	Kepala Desa Plawikan (2023-2029)
2.	Muhtar Budi Wiyono	63	Sekretaris Desa Plawikan
3.	Tugimin	59	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Plawikan
4.	Poerwanta	48	Ketua RT 01
5.	Totok	46	Ketua RT 02
6.	Sri Purwani	41	Ketua Kelompok Wanita Tani



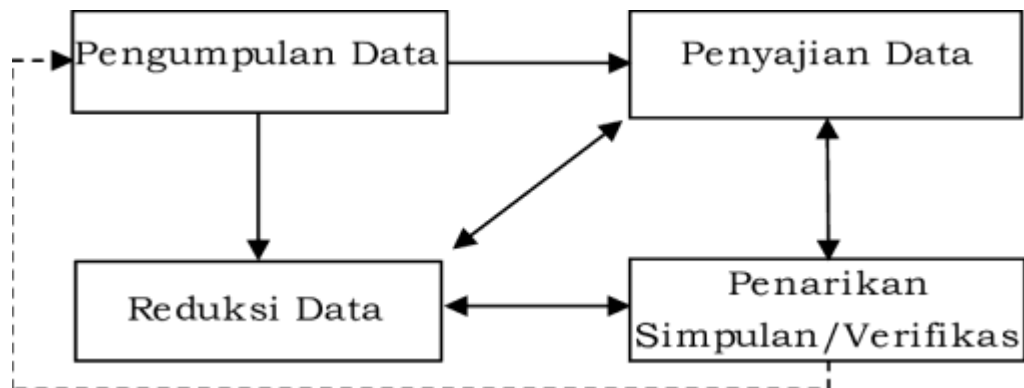
No.	Nama	Umur	Jabatan
7.	Herlambang Jati Wicaksana	29	Kepala Dusun I
8.	Agus Triyanto	41	Kepala Dusun II
9.	Rendra Tri Wahyudi	37	Kepala Dusun III
10.	Agus Sunarwan	59	Kepala BPD
11.	Lilik Ratnawati	41	Kepala Desa Plawikan (2017-2023)

Sumber: Data Peneliti

#### F. Teknik Analisis Data

Proses pada teknik analisis data telah dilakukan sebelum dilakukannya penelitian di lapangan, ketika di lapangan, maupun sesudah dari lapangan. Teknik analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013) teknik analisis data merupakan proses dalam mencari data, menyusun dengan sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, kemudian memilih bagian yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Miles dan Huberman (2005) bahwa analisis data memiliki beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:



Gambar. 2.1 Komponen Analisis Data Interaktif Menurut Miles dan Huberman (2005)

1. Reduksi Data

Dapat diartikan sebagai proses analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu serta mengorganisir data dengan sedemikian rupa, hingga simpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (2005) mereka membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menurut mereka bahwa penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara utama pada analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: jenis matrik, bagan, grafik, dan jaringan. Hal tersebut dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman (2005) adalah sebagian dari kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang diperoleh juga akan diverifikasi kembali selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi selama proses pengumpulan data saja, namun juga perlu diverifikasi ulang sehingga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal

- Amirin, T. M. (2000). *Menyusun rencana penelitian / Tatang M. Amirin*. Jakarta: Rajawali.
- Ariani, M. (2014). Analisis Konsumsi Pangan Tingkat Masyarakat Mendukung Pencapaian Diversifikasi Pangan. *Gizi Indonesia*, 33(1), 20–28.
- Creswell, J. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dewi, G. P., & Ginting, A. M. (2012). Antisipasi Krisis Pangan Melalui Program diversifikasi ketersediaan pangan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, September 2011*, 67–75.
- Dunn, N. W. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003\_compressed-1.pdf* (Kedua, Ed.). Gadjah Mada University Press.
- Eriawati, Y., Prodi Perbankan Syariah, M., & Pasaman Barat, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Pangan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 7(1).
- Hanani, N., Asmara, R., Nugroho, Y., Sosial Ekonomi Pertanian, J., Brawijaya, U., & Veteran Malang, J. (2008). Food Consumption Diversification Analysis in Order to Settling Food Safety of Rural Society. *Bulan Januari, VIII* (1).
- Indrianrini, E., Ir., MS. (2013). Analisis Diversifikasi Pangan dan Tingkat Kecukupannya Pada Rumah Tangga Petani. *Jurnal Ilmiah Pertanian*, 2(1).
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. (2005). *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Mulyani, S., Putri, F. M., Andoko, B. W., Akbar, P., & Novalia, S. (2020). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan

Pangan Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 421. <https://doi.org/10.22146/jkn.60703>

Ningsih, M., & Yusma Damayanti, dan. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Pangan Dan Gizi Rumah Tangga Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Sosial Ekonomika Bisnis*. <https://doi.org/10.22437>

Poerwanto, M. S. H. S. (2016). Model Ketahanan Pangan Berperspektif Gender. *Dimensi, Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 9(2), 93–101.

Prabayanti, J. S. H., dan E. A. (2022). Determinan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa tengah. *Jurnal Pangan*, 31(Media Komunikasi dan Informasi), 191–198.

Pujiati, S., Pertiwi, A., Silfia, C. C., Ibrahim, D. M., & Nur Hafida, S. H. (2020). Analisis Ketersediaan, Keterjangkauan Dan Pemanfaatan Pangan Dalam Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16(2), 123. <https://doi.org/10.20956/jsep.v16i2.10493>

Rasmiati, H., Bakce, D., & Khaswarina, S. (2016). Faktor Determinan Tingkat Ketahanan Pangan Rumah tangga Peserta Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) Di Provinsi Riau. *Jurnal Dinamika Pertanian Universitas Islam Riau*, 32(3).

Ratnawati, L., & Nugroho, E.W, T. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 Melalui Satuan Tugas Jogo Tonggo. *Jcoment (Journal of Community Empowerment)*, 2(3), 97–110. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v2i3.189>

Ratnawati, L. (2023). *Plawikan Mapan* (Herlina, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Pandiva Buku.

Sitanaya, F. U. A. D. L. A. B. (2019). Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedagang Sayur Eceran di Pasar Oeba. *Timorese Journal of Public Health*, 3

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

- Suhardjo. (1998). Konsep dan Kebijakan Diversifikasi Konsumsi Pangan dalam Rangka Ketahanan Pangan. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI. Serpong, 17-20 Februari 1998
- Sumaryanto. (2009). *Diversification as One of the Food Security Pillars*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, vol. 27, no. 2, pp. 93-108.
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (Cetakan 1, Issue 1993). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Umanailo, M. C. B. (2018). Ketahanan Pangan Lokal Dan Diversifikasi Konsumsi Masyarakat (Studi pada Masyarakat desa Waimangit Kabupaten Buru). *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 12(1), 63. <https://doi.org/10.24843/soca.2018.v12.i01.p05>
- Yustika Devi, L., Andari, Y., Wihastuti, L., & Kun Haribowo, R. (2020). Model Sosial-Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 28(2).

### **Peraturan dan Undang-Undang**

- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- PP No. 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi
- Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- Perpres No. 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 pada Pasal 5 Ayat 4 Butir b bahwa Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Permendes PDTT No. 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di Desa dapat digunakan sebagai acuan Desa dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa

Permentan No. 15 Tahun 2013 tentang Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2013

Permentan No. 7 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian

### **Website**

<https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/usia-produktif> diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 14.15 WIB

<https://desaplawikan.com/profil-potensi-desa/> diakses pada Jumat, 14 Juli 2023, Pukul 09.24 WIB.

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/4737/perkuat-ketahanan-pangan-nasional-pemerintah-tingkatkan-ketangguhan-bencana-dan-pemanfaatan-teknologi> diakses pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 09.03 WIB.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4737/perkuat-ketahanan-pangan-nasional-pemerintah-tingkatkan-ketangguhan-bencana-dan-pemanfaatan-teknologi> diakses pada tanggal 05 Agustus 2023 pukul 09.38 WIB.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3496/strategi-menjaga-ketahanan-pangan-nasional-dalam-agenda-pembangunan-nasional> diakses pada tanggal 06 September 2023 pukul 09.17 WIB.

[https://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf\\_Food\\_Security\\_Cocept\\_Note.pdf](https://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf) di akses pada tanggal 30 Agustus 09.12 WIB.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/07/06/510/1140967/bausasran-jaga-ketahanan-pangan-dengan-kampung-sayur> diakses pada 15 Januari 2024 15.21 WIB

<https://klatenkab.bps.go.id/statictable/2019/11/27/411/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-kecamatan-ha-2018.html> diakses pada tanggal 06 September 08.20 WIB

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/12/kemendes-siapkan-pedoman-pemanfaatan-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan> diakses pada tanggal 22 Desember 2023 Pukul 08.40 WIB

<https://plawikan.jogonalan.klatenkab.go.id/profil?sub=tentang&child=visi-dan-misi-desa> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13.26 WIB

<https://rolasan.id/2022/10/01/pengelolaan-ketahanan-pangan-baik-desa-plawikan-dijadikan-field-study/>) diakses pada Senin, 5 Februari 2024

<https://setkab.go.id/meski-iklim-berubah-ketahanan-pangan-harus-tetap-berlanjut/> diakses pada tanggal 6 September 2023 pukul 08.04 WIB.

<https://setkab.go.id/gallery/program-peningkatan-penyediaan-pangan-berbasis-food-estate/> diakses pada tanggal 6 September 2023 pukul 08.13 WIB.

<https://sieradmu.com/terus-berkiprah-pemdes-plawikan-berdayakan-warga-melalui-lomba-ketahanan-pangan/> diakses pada tanggal 06 September 2023 pukul 11.12 WIB.

<https://sieradmu.com/berasnya-harus-premium-kadispermadesdukcapil-jateng-chek-penerimaan-bansos-di-desa-plawikan/> diakses pada 15 Januari pukul 13.02 WIB.

<https://soloraya.solopos.com/warga-satu-desa-di-plawikan-klaten-olah-lahan-mangkrak-jadi-produktif-1271610> diakses pada tanggal 06 September 2023 pukul 11.34 WIB.

<https://www.wartakita.org/membangun-ketahanan-pangan-pemdes-plawikan-kukuhkan-kwt-bantu-dana-rp5-juta-per-kelompok/> diakses pada tanggal 06 September 2023 pukul 11.19 WIB.

[https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/2182/pengaruh-makanan-cepat-saji-terhadap-kesehatan-remaja](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2182/pengaruh-makanan-cepat-saji-terhadap-kesehatan-remaja) diakses pada tanggal 06 September 2023 pukul 10.16 WIB.